

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model hubungan negara dan aktor transnasional oleh Hill, hubungan Indonesia dan PTFI berangkat dari hubungan tawar-menawar normal menjadi hubungan kekuatan kompetitif. Sifat interaksi dari hubungan tawar menawar normal adalah kompromi kemudian menciptakan kesepakatan dan usaha kooperatif antar pihak. PTFI bersedia untuk melakukan FDI miliaran dolar di Indonesia dan pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 1967 dan UU Nomor 11 Tahun 1967 yang sejalan dengan keinginan PTFI dalam mana berbagai keringanan – seperti keringanan pajak – diberikan. KK I yang ditandatangani oleh kedua pihak juga menjadi kontrak yang sangat menguntungkan bagi PTFI. Kekhawatiran PTFI akan penyitaan atau nasionalisasi aset oleh negara tempat perusahaan menanamkan modal juga didengarkan oleh Indonesia yang kemudian mencantumkan ketentuan perihal nasionalisasi yang baru bisa dilakukan ketika ada kepentingan nasional yang mendesak, dan sekalipun langkah tersebut pada akhirnya harus diambil, Indonesia bersedia memberikan kompensasi yang sesuai kepada PTFI.

Dalam perjalanannya, tidak hanya PTFI yang meminta dari Indonesia namun juga sebaliknya. Oleh karena munculnya tuntutan dari lingkungan domestik,

Indonesia sempat meminta PTFI untuk mulai membayar pajak meskipun saat itu masih ada 18 bulan jangka waktu bebas pajak yang tersisa. Indonesia juga meminta sebagian saham PTFI yang kemudian dituruti oleh perusahaan tambang tersebut. PTFI juga mengangkat Ali Budiardjo, seorang warga negara dan tokoh penting Indonesia, sebagai Direktur Utama PTFI. Mendekati tahun 1991, Indonesia memberikan berbagai persyaratan kepada PTFI untuk perpanjangan kontraknya. KK II menambahkan ketentuan divestasi saham, peraturan operasi produksi yang semakin ketat, pembangunan smelter, dan peningkatan keterlibatan dan ekuitas Indonesia di PTFI. Setelah melalui berbagai pertimbangan, PTFI akhirnya sepakat untuk menekan KK II. Berbagai kesepakatan dan usaha kooperatif antara Indonesia dan PTFI tercipta dalam hubungan ini. Beberapa kesepakatan di antaranya adalah KK I dan II, serta pemberian sebagian saham PTFI kepada Indonesia. Di sisi yang sama, usaha kooperatif antar pihak juga terjadi.

Dalam hubungan ini, Indonesia menerima legitimasi input dari PTFI dalam mana Indonesia mau mendengarkan saran dan/atau keinginan PTFI tanpa memperlakukannya sebagai pihak asing. Indonesia juga terlibat dalam dialog dengan PTFI yang tujuan utamanya adalah untuk mengayomi perusahaan tersebut, seperti yang terjadi dalam perundingan antara elit militer Indonesia dan Freeport pada tahun 1965 dan perundingan atas PP Nomor 45 Tahun 2003 terkait persentase royalti yang dibayarkan oleh PTFI ke pemerintah Indonesia. Selain itu, Indonesia mengeksploitasi PTFI untuk tujuan dan kepentingan Indonesia sendiri yang salah satu

kesempatannya dapat diamati dalam Konferensi Investasi Indonesia di Jenewa. Kedekatan PTFI dengan elit pemerintahan AS juga dimanfaatkan Indonesia untuk membangun hubungan dekat dengan negara adikuasa tersebut. Hubungan yang tercipta ini membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia, misalnya Indonesia yang mendapatkan berbagai bantuan dari organisasi internasional – IMF dan Bank Dunia – untuk pembangunan nasional. Tindakan eksploitasi ini bahkan diakui oleh Mohammad Sadli, penasihat ekonomi utama pada masa Orde Baru, yang sempat menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan pemimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. Tidak hanya mengeksploitasi koneksi PTFI, Indonesia juga mengeksploitasi kapasitas dan kapabilitas PTFI seperti dengan meningkatkan pajak dan royalti yang harus dibayarkan kepada Indonesia, semakin ketatnya aturan bagi PTFI dalam beroperasi, membangun smelter, dan melibatkan Indonesia, baik dengan cara memberikan sebagian saham perusahaan ataupun dengan memberikan jabatan penting dalam PTFI kepada elit pemerintahan Indonesia.

Di sisi sebaliknya, PTFI mengajukan perubahan keputusan dan melobi untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia selayaknya yang terjadi saat PTFI keberatan dengan ketentuan divestasi dalam KK II sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan PP Nomor 20 Tahun 1994. Permintaan PTFI untuk izin eksplorasi Grasberg – yang sebelumnya diberikan kepada dua perusahaan asing lain – juga dipenuhi. Pengangkatan elit politik Indonesia sebagai Direktur Utama PTFI dan lobi finansial untuk perlindungan militer yang dilakukan juga merupakan cara PTFI untuk

mempengaruhi pemerintah sehingga mendapatkan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan.

Pemerintah Indonesia dan PTFI sama-sama diuntungkan dalam hubungan tawar-menawar normal. Indonesia mendapatkan sumber pendapatan baru dan besar, modal asing mengalir masuk ke dalam negeri, membangun koneksi dengan aktor-aktor penting di dunia internasional, dan pembangunan di Papua. PTFI, di sisi sebaliknya, berhasil menguasai satu lagi sumber mineral besar dunia yang menjanjikan penghasilan triliunan dolar AS hingga puluhan tahun ke depan, dan mendapatkan segala kemudahan dalam perizinan kegiatan operasi dan produksinya, serta perlindungan dari pemerintah, baik secara politik, ekonomi, maupun militer.

Kemudian hubungan ini berubah menjadi hubungan kekuatan kompetitif semenjak diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Minerba, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU tersebut, dalam mana PTFI selaku pemegang KK diwajibkan untuk mengganti status perjanjiannya menjadi IUPK dan mengikuti segala ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pemegang IUPK. Ketentuan-ketentuan yang kurang disukai oleh PTFI adalah divestasi 51 persen saham perusahaan, kewajiban pemurnian konsentrat dalam negeri yang mendorong pembangunan smelter baru, peningkatan pendapatan negara yang berarti PTFI harus bersedia membayar persentase pajak dan royalti yang lebih tinggi kepada pemerintah Indonesia, dan perpanjangan izin yang hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali

sepuluh tahun kemudian setelah itu WIUPK harus dikembalikan ke pemerintah tanah air.

Sifat interaksi dari hubungan kekuatan kompetitif adalah kedua pihak yang saling bermusuhan dengan elemen *zero-sum* dalam mana keputusan akhir interaksi akan menguntungkan/merugikan salah satu pihak saja. Sebagai contoh, ancaman pengajuan kasus ke arbitrase internasional oleh PTFI. Dari kacamata PTFI, tidak masalah kalah atau menang, langkah ini akan merugikan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia memberikan tawaran kepada PTFI yang bersifat '*take it or leave it*'. Selain hal tersebut, interaksi kedua aktor juga bersifat tidak stabil, terutama ketika opini publik atau anggota pemerintahan terbagi-bagi. Ketidakstabilan ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat yang dikemukakan secara terang-terangan oleh dua menteri Indonesia terkait perpanjangan kontrak PTFI, dan langkah PTFI yang maju mundur perihal kesepakatan dengan Indonesia.

Hubungan kekuatan kompetitif menyebabkan Indonesia mengambil beberapa langkah berikut. Pertama adalah mengabaikan dalam mana Indonesia tidak terlalu peduli jika PTFI ingin mengikuti jejak Newmont dan BHP Billiton untuk hengkang dari Indonesia. Pemerintah Indonesia siap untuk mengelola tambang Grasberg sendiri dengan mengoptimalkan BUMN dan BUMS Indonesia. Kedua, Indonesia menggunakan kekuasaannya atas peraturan perundang-undangan negara seperti yang dapat diamati dalam penerbitan UU Minerba dan PP Nomor 23 Tahun 2010 beserta revisi-revisinya. Ketiga, Indonesia mengatur perihal perpajakan dan perbatasan untuk

melemahkan kekuatan PTFI, bahkan menolak akses PTFI untuk mengekspor konsentrat. Kebijakan ini kemudian menyebabkan PTFI memangkas produksinya dan pemecatan ribuan pekerja Indonesia di PTFI. Keempat, penekanan dilakukan Indonesia yang jelas terlihat dari tindakan Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuannya agar PTFI bersedia merubah status perjanjiannya ke IUPK, dan ketika Indonesia melakukan larangan ekspor konsentrat yang memberikan PTFI tidak banyak pilihan dalam mana ketika produksi PTFI menurun maka pendapatan perusahaan akan menurun yang akan berujung pada nilai saham yang ikut menurun juga, sehingga solusi paling mudah dan cepat ialah mengubah status perjanjiannya menjadi IUPK agar mendapatkan keringanan dari pemerintah Indonesia.

Di pihak yang berlawanan, PTFI bertindak langsung di lingkungan domestik untuk membentuk opini publik. PTFI dikecam oleh masyarakat Indonesia atas kebijakan pemecatan yang diambil. Menanggapi kecaman tersebut, PTFI menempatkan posisinya sebagai korban dalam isu ini untuk menarik simpati dan menyalahkan Indonesia atas kondisi perusahaan yang lesu dengan harapan ada pihak yang bersimpati. Bagi PTFI, lebih baik lagi jika simpati ini kemudian berkembang menjadi kelompok penekan baru yang melawan kebijakan pemerintah Indonesia. Sayangnya, sentimen terhadap PTFI sangatlah besar di antara masyarakat Indonesia sehingga cara ini tidak berhasil.

Pada akhirnya, Indonesia menjadi pihak yang menang dalam hubungan kekuatan kompetitif dengan PTFI ini dalam mana PTFI mengikuti syarat Indonesia untuk mengganti status perjanjiannya dari KK ke IUPK dan mengikuti segala ketentuan yang bersangkutan. PTFI juga telah menyiapkan dana untuk membangun smelter baru untuk meningkatkan kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri sehingga produk yang diekspor akan memiliki nilai tambah yang berarti pendapatan Indonesia dari pajak dan royalti juga akan bertambah. Kemudian PTFI siap menanamkan modal untuk ekspansi tambang bawah tanah Grasberg hingga masa izin habis. Operasi PTFI yang dijalankan pun akan memperhatikan lingkungan di tanah Papua, serta lingkungan ekonomi sosialnya sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, pada saat jangka waktu IUPK Operasi Produksi PTFI habis di tahun 2041 kelak, Indonesia siap untuk mengelola tambang Grasberg dan untuk sementara waktu hingga tahun 2041, Indonesia tinggal menikmati pendapatan negara yang terus meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Binmore, Ken. *Playing for Real: A Text on Game Theory*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Third Edition)*. London: SAGE Publications, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Hennik, Monique, Inge Hutter, and Ajay Bailey. *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publication, 2011.
- Hill, Christopher. *Foreign Policy in the Twenty-First Century (Second Edition)*. New York: Palgrave, 2016.
- Isaacson, Walter. *Kissinger: A Biography*. Boston: Faber & Faber, 1992.
- Loewendahl, Henry Bernard. *Bargaining with Multinationals*. London: Palgrave Macmillan, 2001.
- Lowenfeld, Andreas F. *International Economic Law*. 2nd. New York: Oxford University Press, 2008.
- McCartney, Laton. *Friends in High Places. The Bechtel Story: The Most Secret Corporation and How It Engineered the World*. New York: Ballantine Books, 1989.
- Mealey, George A. *Grasberg: Mining the Richest and Most Remote Deposit of Copper and Gold in the World, in the Mountains of Irian Jaya, Indonesia*. New Orleans: Freeport-McMoran Copper and Gold, 1996.
- Reich, Cary. *The Life of Nelson A Rockefeller: Worlds to Conquer 1908-1958*. New York: Doubleday, 1996.
- Schlesinger, Arthur M. *A Thousand Days: John F Kennedy in the White House*. London: Andre Deutsch, 1965.
- Tahija, Julius. *Horizon Beyond: Entrepreneurs of Asia*. Singapore: Times Books International, 1995.

Vertovec, Steven. *Transnationalism*. London: Routledge, 2009.

Vulliamy, Graham, Keith Lewin, dan David Stephens. *Doing Educational Research in Developing Countries: Qualitative Strategies*. London: Falmer Press, 1990.

Wilson, Forbes. *The Conquest of Copper Mountain*. New York: Atheneum, 1981.

### **Dokumen**

Contract of Work Between The Government of the Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia Company.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weboek voor Indonesie).

Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017.

PP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

PP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.

PP Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994.

PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

PP Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012.

PP Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003.

PP Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014.

UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967.

UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009.

UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960.

UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967.

### **Jurnal**

Coffman, Paul B. "The Rise of a New Metal: The Growth and Success of the Climax Molybdenum Company." *The Journal of Business of the University of Chicago* 10, no. 1 (Januari 1937): 35-40.

Duanmu, Jing-lin. "State-owned MNCs and host country expropriation risk: The role of home state soft power and economic gunboat diplomacy." *Journal*

- of International Business Studies* (Palgrave Macmillan) 45, no. 8 (October/November 2014): 1044-1060.
- Emerson, William K. "51." *Encyclopedia of United States Army Insignia and Uniforms* (University of Oklahoma Press), 1996: 412-414.
- Huntington, Samuel. "Transnational organisations in world politics." *World Politics* 25, no. 3 (1973): 333-368.
- Leith, Denise. "Freeport and the Suharto Regime, 1965-1998." *Contemporary Pacific* (University of Hawaii Press) 14, no. 1 (2002): 69-102.
- McGregor, Katharine E. "Representing the Indonesian Past: The National Monument History Museum from Guided Democracy to the New Order." *Indonesia; Ithaca* (Cornell Southeast Asia Program), no. 75 (April 2003): 91-122.
- Nakagawa, Junji. "Freeport's Grasberg/Ertsberg Mine in West Papua, Indonesia." *Capacity Building for Investment Liberalization and Facilitation*. Singapore: APEC Secretariat, 2008. 73-88.
- Rifai-Hasan, P. A. "Development, Power, and the Mining Industry in Papua: A Study of Freeport Indonesia." *Journal of Business Ethics* (Springer Nature B.V.) 89 (November 2009): 129-143.
- Sadli, Mohammad. "Recollections of my career." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 29, no. 1 (1993): 35-51.
- Schonhardt, Sara. "Freeport Put \$12 Billion Into a Giant Mine; Now Indonesia Is Squeezing It Out; U.S. miner fights back against new rules that would force it to cede control of Grasberg; Jakarta holds firm." *The Wall Street Journal*, 2017.
- Sethi, S. Parkash, David B. Lowry, Emre A. Veral, H. Jack Shapiro, dan Olga Emelianova. "Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc: An Innovative Voluntary Code of Conduct to Protect Human Rights, Create Employment Opportunities, and Economic Development of the Indigenous People." *Journal of Business Ethics* (Springer Nature B.V.) 103, no. 1 (September 2011): 1-30.

## Laporan

Witness, Global. *Paying for Protection: The Freeport mine and the Indonesian security forces*. Washington: Global Witness Publishing Inc., 2005.

## Tesis dan Disertasi

Carolina, Dian Indah. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Lingkungan PT Freeport Indonesia melalui Kerjasama Ekspedisi Mahitala UNPAR di Gunung Carstensz (Skripsi)." *Repository Unpar*. 2018.  
<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6422/Cover%20-%20Bab1%20-%203313093sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses pada April 23, 2019).

Elmslie, Jim. *Irian Jaya under the Gun: Indonesian Economic Development versus West Papuan Nationalism*. Tesis PhD, Sydney: University of Sydney, 2000.

Wiratama, Daniel Tantra. "Freeport Mining Industry in West Papua: the Dynamics of Mining Operations towards the Development of West Papua (Skripsi)." *Repository Unpar*. 2017.  
<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6510/Cover%20-%20Bab1%20-%203314138sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses pada April 20, 2019).

## Wawancara

Sadli, Mohammad, wawancara oleh Denise Leith. (September 17, 1998).

Soetaryo, Sigit, wawancara oleh Denise Leith. (September 18, 1998).

## Website

Agustinus, Michael. *Freeport Ingin Perpanjangan Hingga 2041, Ini 3 Syarat Jokowi*. Agustus 31, 2017. <https://finance.detik.com/energi/d-3623466/freeport-ingin-perpanjangan-hingga-2041-ini-3-syarat-jokowi> (diakses pada Mei 15, 2019).

Akbar, Wishnugroho. *Komnas HAM Kritik Pimpinan Freeport Berlatar Belakang Militer*. November 20, 2016.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161120163828-20-173962/komnas-ham-kritik-pimpinan-freeport-berlatar-belakang-militer> (diakses pada Juni 10, 2019).

Armenia, Resty. *Minta Kejelasan Investasi, Bos Freeport Temui Jokowi*. Juli 2, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150702123415-85-63845/minta-kejelasan-investasi-bos-freeport-temui-jokowi> (diakses pada Mei 17, 2019).

Arvirianty, Anastasia. *Amien Rais Sebut Kontribusi Freeport di RI Cuma 1%, Benarkah?* Juli 26, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180726164400-4-25557/amien-rais-sebut-kontribusi-freeport-di-ri-cuma-1-benarkah> (diakses pada Mei 10, 2019).

BBC. *Pemerintah Indonesia dapatkan 51% saham dan perpanjang kontrak Freeport*. Agustus 29, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41079090> (diakses pada Mei 19, 2019).

Bloomberg. *Company Overview of of Cyprus Amax Minerals Company*. 2019. <https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=265498> (diakses pada April 30, 2019).

Budiartie, Gustidha. *Freeport: Sukarno Tolak, Soeharto Teken Kontrak, Jokowi Rebut*. Juli 12, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180712154150-4-23248/freeport-sukarno-tolak-soeharto-teken-kontrak-jokowi-rebut>.

—. *Jelang Akuisisi, Begini Langkah Jokowi Rebut Kembali Freeport*. Desember 21, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181221114203-4-47432/jelang-akuisisi-begini-langkah-jokowi-rebut-kembali-freeport> (diakses pada Juni 14, 2019).

—. *Pasal-Pasal di Kontrak Freeport Ini yang Bikin RI Repot*. Juli 17, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180717200138-4-24052/pasal->

pasal-di-kontrak-freeport-ini-yang-bikin-ri-repot (diakses pada April 30, 2019).

—. *Riwayat Divestasi Freeport ke Indonesia*. Januari 12, 2018.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180112160028-4-1350/riwayat-divestasi-freeport-ke-indonesia>.

Budiartie, Gustidha, dan Tito Bosnia. *Akuisisi 51% Saham Freeport Rp 57 T, Rugikah RI?* Juli 11, 2018.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180711161244-4-23078/akuisisi-51-saham-freeport-rp-57-t-rugikah-ri> (diakses pada Mei 15, 2019).

CNN Indonesia. *Disnaker Mimika Minta Freeport 'Tarik' Para Pekerja*. Oktober 31, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181031210432-85-343054/disnaker-mimika-minta-freeport-tarik-para-pekerja> (diakses pada Maret 28, 2019).

—. *Disnaker Mimika Minta Freeport 'Tarik' Para Pekerja*. Oktober 31, 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181031210432-85-343054/disnaker-mimika-minta-freeport-tarik-para-pekerja> (diakses pada April 28, 2019).

Duta, Diemas Kresna. *Danai Proyek Smelter, Freeport Siapkan Dana Rp 28,7 Triliun*. Februari 24, 2015.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150224184236-85-34544/danai-proyek-smelter-freeport-siapkan-dana-rp-287-triliun?> (diakses pada Juni 14, 2019).

—. *Negara Butuh Satu Smelter Tembaga Lagi, Siapa Tertarik?* Maret 3, 2015.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150302235219-85-36210/negara-butuh-satu-smelter-tembaga-lagi-siapa-tertarik> (diakses pada April 30, 2019).

Freeport-McMoRan. *Our History*. 2019. <https://fcx.com/about/history> (diakses pada April 30, 2019).

Gumelar, Galih. *Pemerintah Minta Freeport Angkat Kaki, jika Kalah Arbitrase*. Februari 21, 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170221130905-85->

194966/pemerintah-minta-freeport-angkat-kaki-jika-kalah-arbitrase (diakses pada Mei 17, 2019).

Idham, Addi M. *Menteri ESDM Jelaskan Syarat Perpanjangan Masa Operasi Freeport*. Juli 12, 2018. <https://tirto.id/menteri-esdm-jelaskan-syarat-perpanjangan-masa-operasi-freeport-cN32> (diakses pada Mei 15, 2019).

Isidorus, Robert. *Pernyataan Bos Besar Freeport Tolak Akhiri Kontrak Karya*. Februari 21, 2017.

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/415547/pernyataan-bos-besar-freeport-tolak-akhiri-kontrak-kary> (diakses pada Mei 16, 2019).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*. Juni 10, 2019.

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb) (diakses pada Juni 10, 2019).

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Tidak Gentar, Indonesia Siap Hadapi Freeport di Arbitrase Internasional*. 2016.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/9214/Tidak-Gentar,-Indonesia-Siap-Hadapi-Freeport-Di-Arbitrase-Internasional> (diakses pada April 23, 2019).

Khaerudin. *Freeport Indonesia di Persimpangan Jalan*. 2017. [https://arsip-interaktif.kompas.id/freeport\\_indonesia](https://arsip-interaktif.kompas.id/freeport_indonesia) (diakses pada April 30, 2019).

Kusuma, Hendra. *Freeport Siap Investasi US\$ 20 M di Tambang Bawah Tanah hingga 2041*. Desember 21, 2018. <https://finance.detik.com/energi/d-4354660/freeport-siap-investasi-us-20-m-di-tambang-bawah-tanah-hingga-2041> (diakses pada Juni 14, 2019).

Nababan, Christine Novita. *Freeport Pusat Hapus Rencana Investasi US\$1 Miliar per Tahun*. Maret 2, 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170302141102-85-197323/freeport-pusat-hapus-rencana-investasi-us-1-miliar-per-tahun> (diakses pada Mei 19, 2019).

PTFI. *Bagaimana Kami Beroperasi: Saat ini PT Freeport Indonesia (PTFI) menerapkan dua teknik penambangan*. 2018. <https://ptfi.co.id/id/how-do-we-operate> (diakses pada April 30, 2019).

- PTFI. *Sekilas Tentang Kami*. 2018. <https://ptfi.co.id/id/overview> (diakses pada April 28, 2019).
- Rachman, Fadhly Fauzi. *Pemerintah Tak Akan Persulit Ekspor Freeport Asal Patuhi Hal Ini*. Juli 12, 2018. <https://finance.detik.com/energi/d-4112080/pemerintah-tak-akan-persulit-ekspor-freeport-asal-patuhi-hal-ini> (diakses pada Juni 14, 2019).
- Suryowati, Estu. *Rizal Ramli Vs Sudirman Said Soal Freeport, Sebaiknya Diselesaikan Lewat Presiden*. Oktober 13, 2015. <https://money.kompas.com/read/2015/10/13/103802726/Rizal.Ramli.Vs.Sudirman.Said.soal.Freeport.Sebaiknya.Diselesaikan.lewat.Presiden> (diakses pada Mei 17, 2019).
- Tempo. *Dilarang Ekspor, Freeport Ancam Gugat Pemerintah*. Januari 27, 2017. <https://bisnis.tempo.co/read/840280/dilarang-ekspor-freeport-ancam-gugat-pemerintah> (diakses pada Juni 14, 2019).
- . *Lobi Tingkat Tinggi Menteri di Balik Negosiasi Freeport*. Edited by Dewi Rina Cahyani. Juli 22, 2018. <https://bisnis.tempo.co/read/1109333/lobi-tingkat-tinggi-menteri-dibalik-negosiasi-freeport> (diakses pada Mei 18, 2019).